



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SINERGI PENGELOLAAN PAJAK, BELANJA DAN UTANG, DONGKRAK PEREKONOMIAN

Ariesy Tri Mauleny
Analisis Legislatif Ahli Muda
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah cukup berlega hati dengan capaian kinerja penerimaan pajak yang mendekati target APBN 2022. Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak selama 10 bulan berjalan di tahun 2022 mencapai Rp1.446,2 triliun. Capaian tersebut sudah 97,5 persen dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 98/2022 sebesar Rp1.485 triliun. Diperkirakan penerimaan pajak tahun 2022 ini akan mencapai Rp1.747,33 triliun atau 117 persen dari target.

Beberapa jenis pajak bahkan telah melampaui target. Misalnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas mencapai 105,1 persen dan PPh nonmigas mencapai 104,7 persen. Sementara pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sudah mencapai 89,2 persen dari target. Begitu juga pajak bumi dan bangunan (PBB) sudah terealisasi 80,6 persen dari target. Namun, perlu diwaspadai mengingat capaian tersebut mulai melandai sejalan dengan meningkatnya restitusi dan tingginya basis penerimaan di akhir tahun. Ditambah lagi banyak ditopang oleh harga komoditas yang dikhawatirkan ke depan tidak akan setinggi sebelumnya.

Kondisi tersebut didorong oleh ketidakpastian yang masih terus membayangi ekonomi global. Perang Rusia Ukraina masih menjadi penyebab utama, ditambah ekonomi China yang mulai terganggu dengan kebijakan *lockdown* menyusul lonjakan kasus Covid-19. Tanda-tanda pengetatan pasar kerja dan perlambatan aktivitas ekonomi juga memicu kekhawatiran inflasi dan resesi global. Institute of International Finance memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi global hanya 1,2 persen pada 2023, setara dengan pertumbuhan 2009 ketika dunia baru mulai bangkit dari krisis keuangan. Sementara Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebutnya sebagai proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang signifikan di 2023.

Dari sisi belanja, realisasi per akhir Oktober 2022 mencapai Rp2.351,1 triliun atau 75,7 persen dari target Rp3.106,4 triliun. Meski capaian tersebut tumbuh 14,2 persen (*yoy*), namun masih Rp755,3 triliun yang harus dihabiskan dalam sisa waktu 2 bulan yang dimiliki pemerintah untuk menggenjot perekonomian lewat penyerapan belanja. Diperkirakan realisasi belanja tahun ini hanya mencapai 83 persen dari pagu APBN, sangat disayangkan.

Realisasi terendah ada pada belanja nonK/L yang baru mencapai Rp917,7 triliun atau 67,7 persen dari target. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi penyaluran subsidi kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik serta pembayaran pensiun dan jaminan kesehatan. Sebenarnya belanja pemerintah harusnya dapat menjadi salah satu kontributor dalam produk domestik bruto (PDB), namun selama tiga kuartal berturut-turut, konsumsi pemerintah mencapai kontraksi. Tercatat konsumsi pemerintah pada kuartal I-2022 turun 7,74 persen, dan masih menurun pada kuartal selanjutnya sebesar 5,24 persen dan 2,88 persen. Bukan berarti bahwa, kebutuhannya adalah menghabiskan belanja namun bagaimana menghadirkan

belanja berkualitas sehingga memiliki *multiplier effect* atau daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi APBN sebagai *shock absorber* pun jika dilihat dari realisasi belanja, seharusnya masih dapat ditingkatkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Belum lagi jika dikaitkan dengan amanat mengembalikan defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB sesuai UU 2/2020. Perlu didukung oleh konsolidasi fiskal melalui beberapa kebijakan di bidang anggaran, misalnya saja menekan semaksimal mungkin pembiayaan melalui utang. Hingga Oktober 2022, pembiayaan utang baik yang melalui penerbitan surat berharga (SBN) maupun pinjaman mengalami pertumbuhan negatif 21,7 persen atau Rp506 triliun jika dibandingkan dengan tahun lalu (*yoy*) yang sebesar Rp646 triliun. Penerbitan SBN sebagai mayoritas sumber utang banyak dikontribusi dari surat keputusan bersama (SKB) I hingga III antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, yang menjadi satu cara agar utang tidak terlalu membebani keuangan negara di kemudian hari. Sejauh ini realisasi pembelian SBN oleh BI telah mencapai Rp974,09 triliun.

Perlu ada upaya lain untuk menjaga sisi moneter misalnya saja dengan memaksimalkan devisa hasil ekspor (DHE), menyesuaikan suku bunga deposito valuta asing dan mengurangi ketergantungan dengan dolar AS lewat *local currency transaction*, sambil terus menguatkan komunikasi untuk meningkatkan kepercayaan pasar pada rupiah. Hal ini cukup menjadi sinyal bahwa APBN dapat disehatkan kembali dan konsolidasi fiskal berada pada jalur yang tepat.

Atensi DPR

DPR melalui Komisi XI perlu memastikan bahwa dinamika kebijakan *extraordinary* dalam akselerasi pemulihan dan reformasi struktural menjadi pertimbangan bagi kebijakan *high quality fiscal consolidation* yang menjamin defisit kembali maksimal 3 persen PDB, benar terjadi di 2023 meski ketidakpastian global masih menguat. Di tengah upaya terus menguatkan penerimaan pajak untuk mendorong perekonomian dengan fokus pada kelompok wajib pajak besar, khusus, dan madya. Percepatan belanja negara prioritas harus dilakukan sehingga peran APBN sebagai *shock absorber* benar terjadi.

DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk tetap berhati-hati dalam menjaga pengelolaan pembiayaan utang dalam menghadapi situasi pasar keuangan yang masih rentan akibat tren kenaikan suku bunga maupun fluktuasi nilai tukar rupiah. Namun demikian DPR juga tetap perlu memastikan fleksibilitas penguatan ketahanan fiskal semakin memerhatikan transformasi ekonomi yang hijau, inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan di tengah upaya membangun kemandirian pangan dan energi.

Sumber

Kontan, 24 dan 25 November 2022;

Kompas, 28 November 2022;

Republika, 28 November 2022;



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.